

TESIS ROBERT KUTTNER DAN MENGUATNYA KELOMPOK POPULIS KANAN DI INDONESIA

¹Bustomi

akubisa@bustomimenggugat.com

Abstract

This paper tries to see why in post-reform Indonesia, right-wing populist groups strengthened using the knife of analysis from Robert Kuttner in his book entitled *Can Democracy Survive Global Capitalism*. Robert Kuttner mentions 5 factors causing the rise of right-wing populism. First, there is a process of convergence between the development of capitalism and the strengthening of democratic politics. Second, there was a significant political shift. The third is the phenomenon of undemocratic globalization. Fourth, it is the implication of the third factor which greatly influences political spaces. Fifth, there is socio-political vulnerability.

Keywords : Populist Right, Political Islam, Robert Kuttner

Abstrak

Tulisan ini mencoba melihat mengapa di Indonesia pasca reformasi, kelompok populis kanan menguat dengan memakai pisau analisis dari Robert Kuttner dalam bukunya yang berjudul *Can Democracy Survive Global Capitalism*. Robert Kuttner menyebutkan ada 5 faktor penyebab meningkatnya populisme kanan meningkat. *Pertama*, terjadinya proses konvergensi antara perkembangan tatanan kapitalisme dengan penguatan politik demokrasi. *Kedua* adanya pergeseran politik yang signifikan. *Ketiga* adalah, fenomena *undemocratic globalization*. *Keempat*, merupakan implikasi dari faktor ketiga dimana sangat mempengaruhi ruang-ruang politik. *Kelima* adanya kerentanan sosial politik.

Kata Kunci: *Populis Kanan, Islam Politik, Robert Kuttner*

¹ Mahasiswa Program Magister Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga Surabaya, Indonesia

PENDAHULUAN

Pasca reformasi, di Indonesia kelompok populis kanan yang mengusung Islam Politik² yakni sebuah ideologi atau gerakan yang ingin mendirikan negara Islam atau menerapkan syariat Islam dalam sebuah negara, menguat. Menariknya, menguatnya kelompok populis kanan ini tidak hanya berasal dari kelompok Islam modern melainkan juga dari kluster Islam tradisional yang dalam bahasa Presiden RI ke-4 KH. Abdurrahman Wahid³ disebut sebagai kiai kampung. Tentu menjadi pertanyaan besar bagaimana tokoh agama Islam lokal yang notabene tinggal di daerah atau perdesaan justru memiliki semangat Islam Politik mirip dengan kelompok populis kanan. Kelompok ini kerap kali mengedepankan politik identitas dan menjadikan agama sebagai alat untuk mencapai kepentingannya. Sehingga tokoh muda muslim yang kini menjabat Menteri Agama RI, Yaqut Cholil Qoumas⁴ menyebut bahwa dirinya tidak ingin menjadikan agama sebagai alat politik.

Fenomena ini, menurut penulis perlu ditelaah dan dijelaskan secara lebih terperinci factor-faktor penyebabnya. Hal ini mengingat Islam di Indonesia identik dengan sikap moderat dan bahkan dalam menyikapi Islam Politik, salah satu ormas Islam terbesar di Indonesia, Nahdlatul Ulama menyatakan bahwa memilih konsep *Darus Salam* alih-alih *Darul Islam*.

² Lihat pembahasan Hamid Fahmy Zarkasyi dalam “*Identitas dan Problem Politik Islam*” dalam Jurnal ISLAMIA Volume V No.2, Tahun 2009. (hal. 5-11)

³ Lihat <https://www.nu.or.id/post/read/75259/gus-dur-menyebutnya-kiai-kampung->

⁴ Lihat <https://nasional.kompas.com/read/2020/12/23/06344311/yaqut-cholil-qoumas-agama-jangan-lagi-digunakan-jadi-alat-politik?page=all>

Keduanya tentu berbeda. Jika Darul Islam berarti merujuk pada Islam Politik⁵, sementara *Darus Salam* merupakan sikap yang masih dipegang Nahdlatul Ulama hingga saat ini yaitu fokus pada diterapkannya nilai-nilai keagamaan dan bisa dilakukan dalam format bukan negara Islam sehingga penerimaan Nahdlatul Ulama kepada NKRI sudah final. Karena itu, sikap Nahdlatul Ulama yang menegaskan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah harga mati menjadi sikap yang kian mengkristal guna menghadapi makin menguatnya Islam Politik.

Disinilah menariknya dimana secara formal, penegasan melawan Islam Politik yang dibawa oleh kelompok populis kanan memang gencar dilakukan tetapi fakta di lapangan semakin menunjukkan adanya tokoh agama Islam lokal atau kiai kampung justru mendukung aras penguatan Islam Politik sehingga bermunculan perda-perda syariah. Karya tulis mengenai Islam Politik bisa jadi banyak dilakukan. Namun, dalam pandangan penulis, kebanyakan berfokus pada membedah kekeliruan atau kesalahpahaman kelompok Islam Politik seperti yang ditulis Abdul Aziz⁶ yang memfokuskan penelitiannya pada kontribusi Islam dalam proses pembentukan negara.

Ada pula seperti M. Kholid Syeirazi⁷ yang membedah mengenai genealogi gerakan Islam dan remoderasi Islam. Tulisan-tulisan tersebut belum menjawab mengapa kemudian di tubuh Nahdlatul Ulama mulai bermunculan kelompok yang memiliki kesamaan sikap dan arah

⁵ Bisa dilihat pada buku Oliver Roy dalam *The Failure of Political Islam* (1994)

⁶ Abdul Aziz dalam *Chieftdom Madinah: Salah Paham Negara Islam* (Jakarta: Penerbit Alvabet, 2011)

⁷ M. Kholid Syeirazi dalam *Wasathiyah Islam: Anatomi Narasi dan Kontestasi Gerakan Islam* (Jakarta: Penerbit Alif.Id, 2020)

gerakan sosial politiknya. Karena itulah, tesis Robert Kuttner dengan 5 pisau analisisnya, penulis nilai dapat membantu kita memahami, mengapa kelompok populis kanan di Indonesia menguat.

METODOLOGI

Tulisan ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif melalui studi pustaka. Pendekatan deskriptif dipilih karena memang bertujuan untuk menggambarkan, meringkas berbagai kondisi, situasi atau berbagai fenomena sosial yang ada di masyarakat yang menjadi objek penelitian yang kemudian penulis berupaya sedemikian rupa menarik realitas tersebut ke permukaan sebagai suatu fenomena tertentu.

Sementara pendekatan kualitatif dapat membantu penulis untuk mengungkap dan memahami sesuatu dibalik fenomena yang belum diketahui. Metode ini dapat juga digunakan untuk mendapatkan wawasan tentang sesuatu yang baru sedikit diketahui, serta dapat membantu penulis memberikan rincian yang lebih lengkap tentang suatu peristiwa atau fenomeena yang sulit diungkapkan jika harus menggunakan metode kuantitatif.⁸

PEMBAHASAN

Faktor Menguatnya Kelompok Populis Kanan

Dalam buku karya Robert Kuttner berjudul “*Can Democracy Survive Global Capitalism*”⁹ yang terbit tahun 2019, kita bisa melihat bagaimana relasi anantara munculnya gerakan populisme kanan dan

⁸ Strauss & Corbin, 2003, Dasar-dasar Penelitian Kualitatif : Tata Langkah dan Teknik Teorisasi Data. Pustaka Pelajar: Yogyakarta. P. 5

⁹ Robert Kuttner.2019. *Can Democracy Survive Global Capitalism*. New York: W.W Norton & Company

“gagalnya” konsep kontrak sosial yang terjadi di negara-negara yang menganut demokrasi.

Awalnya, Kuttner ingin melihat bagaimana kemampuan demokrasi dalam memanfaatkan kapitalisme di tengah arus globalisasi yang ada. Dimana, selama satu dekade terakhir, gelombang politik populisme kanan menghantam negara-negara demokrasi di dunia. Tak pelak aroma kebencian (*hate speech*), perseteruan berbasis antagonisme budaya menyebar dan merongrong benteng demokrasi di berbagai negara di dunia. Bangkitnya gelombang politik populisme kanan ini tidak hanya terjadi di negara-negara yang baru saja membangun demokrasi tetapi juga melanda negara demokrasi mapan seperti Amerika Serikat dan sejumlah negara di Eropa Barat. Negara-negara dengan demokrasi kuat ini juga ternyata tidak lepas dari gempuran dari politik artikulasi *xenophobia* seperti penolakan terhadap kaum imigran, kebencian terhadap kelompok kultural yang dianggap sebagai ancaman terhadap kelompoknya sendiri, penolakan terhadap apa yang disebut sebagai kelompok *the established* dan semua bentuk antagonisme yang sifatnya kultural. Dengan kata lain, menguatnya politik identitas.

Robert Kuttner melalui bukunya ini memperluas horizon dan cakrawala pengetahuan dengan mencari benang merah antara kecenderungan politik agresif yang saat ini sedang menggejala dalam fokusnya terkait politik Amerika Serikat dengan persoalan ekonomi politik dan struktural terutama terkait dengan persoalan-persoalan seperti runtuhnya konsensus besar antara kelas-kelas sosial dalam membangun tatanan negara kesejahteraan (*welfare state*) pasca Perang Dunia II, lalu tampilnya kekuatan sosial dominan dimana 1% saja kekuatan sosial yang menguasai panggung politik serta arah globalisasi

yang semakin melepaskan diri dari otoritas politik demokrasi. Robert Kuttner mengakhiri buku ini dengan memberikan formulasi kebijakan dan langkah-langkah politik yang dapat menyelamatkan warga dan mengembalikan tatanan ekonomi kapitalisme untuk kembali *demos* dalam sistem politik demokrasi.

Fenomena yang disorot Robert Kuttner ini menarik sekaligus memprihatinkan. Menarik karena pada awal abad ke-20, sempat muncul optimisme terkait bagaimana harapan bahwa kapitalisme akan bersanding dengan baik bersamaan dengan demokratisasi liberal yang terjadi pasca Perang Dunia II dimana diakumulasikan dengan apik oleh Francis Fukuyama dengan judul “*The End of History and The Last Man*” (1989). Berakhirnya sejarah manusia. Ternyata harapan tersebut tidak terjadi karena ada semacam *primitive backlash* atau bisa dibaca sebagai “perlawanan” yang muncul dalam bentuk “kemarahan-kemarahan” di banyak titik. Robert Kuttner melihat fenomena *primitive backlash* ini tidak dapat dilepaskan dari kondisi ekonomi politik yang terjadi di Amerika Serikat, negara Eropa yang mapan secara demokrasi maupun di negara yang demokrasinya tengah berkembang.

Robert Kuttner setidaknya melihat ada lima faktor yang bisa menjelaskan mengapa hal tersebut terjadi dimana antara satu faktor dengan lainnya saling terkait. *Pertama*, runtuhnya *Great Consensus* yang menjadi acuan dari tatanan ekonomi politik dunia terutama tiga dekade pasca Perang Dunia II. Jadi antara 1945 hingga 1970-an, terjadi proses konvergensi antara perkembangan tatanan kapitalisme dengan penguatan politik demokrasi. Alih-alih tatanan demokrasi mampu melayani *demos* pada pasar dimana kapitalisme hidup, yang terjadi justru proses kapitalisme dan akumulasi kapital berjalan tanpa batas

sehingga memunculkan krisis ekonomi dunia sehingga tatanan ekonomi *demos* yang diimpikan tidak terwujud. Dampaknya terjadilah “guncangan” politik baik kanan atau kiri. Guncangan politik ini bisa dibaca sebagai bentuk kemarahan *demos* yang menilai kapitalisme telah meninggalkan aspek demokrasi dalam prosesnya sehingga *balancing* antara modal dan kapital tak terjadi.

Di Indonesia, pasca reformasi yang diharapkan mampu membawa perubahan lebih baik, ternyata tidak lebih baik dari sector ekonomi dimana indicator utama, koefisien gini antara era sebelum reformasi dan pasca. Menurut Bappenas RI¹⁰, koefisien gini merupakan ukuran statistik yang menunjukkan distribusi pengeluaran per kapita penduduk suatu daerah yang kemudian digunakan sebagai tolok ukur ketimpangan. Menurut Anthony Budiawan dari Kwik Kian Gie Business of School, pada periode 1980-1996, koefisien gini di Indonesia rata-rata berada pada interval 0,32-0,35¹¹. Sementara menurut data Bank Dunia, koefisien gini di Indonesia pada periode 2000an berada pada angka 0,39.¹²

Faktor *kedua* menurut Kuttner adalah *political shift* atau pergeseran politik yang signifikan. Pergeseran politik ini terjadi seiring dengan krisis ekonomi yang terjadi di negara dengan demokrasi mapan seperti Eropa Barat dan Amerika Serikat yang dipicu oleh naiknya harga minyak akibat adanya embargo minyak dari Arab Saudi pada

¹⁰ Lihat https://sepakat.bappenas.go.id/wiki/Koefisien_Gini (diakses 25 Juli 2023 pukul 16.05 WIB)

¹¹ Lihat <https://money.kompas.com/read/2015/03/18/164300326/Dibanding.Orde.Baru.Kesenjangan.Sosial.di.Era.Reformasi.Justru.Melebar> (diakses 25 Juli 2023 pukul 16.25 WIB)

¹² Lihat <https://www.indonesia-investments.com/id/keuangan/angka-ekonomi-makro/kemiskinan/item301?> (diakses pada 25 Juli 2023 pukul 16.27 WIB)

tahun 1970-an. Momentum inilah yang dimanfaatkan oleh kelompok kaya 1% untuk melakukan *political take over*. Momentum ini ditandai dengan munculnya Presiden Ronald Reagan tahun 1980 di Amerika Serikat, kemudian munculnya Perdana Menteri Margareth Thatcher tahun 1979 di Inggris, dan fenomena *political shift* ini juga menyebar di banyak tempat. Pergeseran politik ini di-*back up* oleh *think tank*, kelompok intelektual dan kekuatan politik lainnya. Pergeseran politik inilah yang kemudian mulai memunculkan perlawanan demi perlawanan terutama dari kelompok menengah. Penyebabnya konsensus bersama misal mengenai pemberlakuan pajak progresif untuk mendorong adanya *public services* mulai dilanggar. Kebijakan ekonomi yang disebut sebagai pengetatan ikat pinggang menjadi pilihan kebijakan kelompok politik baru ini dimana termasuk juga adanya privatisasi radikal terhadap BUMN, lepasnya kontrol ketat terhadap institusi perbankan (*deliberation of finance*) dan ditinggalkannya kekuatan sosial seperti serikat pekerja, serikat profesi dalam proses tata pemerintahan dan pembangunan negara. Para kelompok kaya 1% inilah menyiapkan formulasi ekonomi global baru yang semakin menjauh dari nilai-nilai demokrasi yang disepakati awalnya.

Faktor kedua ini pun, untuk Indonesia, datanya kurang lebih sama, menurut Tim Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TP2K) dimana 1% orang kaya Indonesia menguasai sekitar 50% aset nasional¹³.

¹³ Lihat <https://nasional.kompas.com/read/2019/10/09/17023551/tnp2k-satu-persen-orang-indonesia-kuasai-50-persen-aset-nasional> (diakses 25 Juli 2023 pukul 16.31 WIB)

Faktor *ketiga* menurut Kuttner adalah, corak globalisasi yang digelontorkan sebagai dampak pergeseran politik pada faktor kedua tadi ternyata menjadi *undemocratic globalization*. Karena demokrasi bekerja dalam batasan *nation-state* sementara kapitalisme global terus terjadi tanpa pengawasan dari institusi demokrasi yang skalanya juga global. Sehingga bagaimana *tax collector* berjalan, bagaimana kapital berpindah nyaris berjalan tanpa pengawasan yang melampaui lingkup negara bangsa sehingga semakin memperkuat posisi kelompok kaya 1% tadi tidak hanya secara ekonomi tetapi juga politik. Globalisasi hanya dapat dinikmati oleh mereka yang memiliki akumulasi kapital besar. Sementara mayoritas yang tak memiliki akses terhadap kekayaan, mengalami stagnasi bahkan lebih buruknya menerima dampak negatif dari bekerjanya akumulasi kapital besar yang dikuasai oleh kelompok kaya 1% tadi.

Dampak dari faktor ketiga menurut Robert Kuttner ini, maka bermunculan banyak partai politik di Indonesia yang justru dikomandoi oleh sejumlah pengusaha. Sehingga penguasaan ekonomi dan politik oleh 1% orang kaya dengan kekuatan asset sebesar 50% asset nasional membuat kondisi semakin tidak ideal. Distribusi ekonomi yang diharapkan oleh demokrasi tidak terjadi, malah semakin terpusat pada segelintir orang saja. Apalagi segelintir orang kaya tersebut dikuasai kelompok tertentu, yang mengakibatkan sentiment etnis semakin menguat justru di era reformasi.

Faktor *keempat*, merupakan implikasi dari faktor ketiga dimana sangat mempengaruhi ruang-ruang politik. Dimana partai politik yang berbasis sosial demokrasi seperti Partai Demokrat di Amerika Serikat, Partai Buruh di Inggris, secara perlahan mulai meninggalkan kelompok

konstituen utama mereka dan cenderung mendekati kelompok konstituen baru yakni kelompok kaya 1% tadi. Partai-partai ini menyadari bahwa kontestasi politik membutuhkan kapital yang besar, sehingga ikut berebutan sumber dana besar dengan kelompok konservatif yang berlimpah kemakmuran. Contoh besarnya adalah jawaban dari mantan Perdana Menteri Inggris Margareth Thatcher ketika ditanya pasca ia tak lagi menjabat. Margareth ditanya “Apa warisan terbesar anda selama menjabat Perdana Menteri Inggris?” Kemudian dijawab olehnya, “warisan terbesar saya adalah *The New Labour*, Si Tony Blair dari Partai Buruh.” Ini yang kemudian menjadikan Partai Konservatif sebagai kompetitor partai Buruh di Inggris mengikuti langgam si Wanita Besi tersebut.

Di era reformasi, khususnya pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono¹⁴, kelompok populis kanan terlihat tumbuh subur yang kemudian mengakibatkan kasus-kasus persekusif terhadap kelompok berbeda menguat dan munculnya perda-perda yang bersifat diskriminatif dan mengakibatkan konflik horizontal di masyarakat, bahkan hingga saat ini.

Faktor terakhir yang menjadi sorotan Robert Kuttner adalah, bentuk akumulasi dari 4 faktor lainnya yakni rentannya situasi sosial politik sehingga demokrasi yang terjadi hanya nampak di permukaan saja tapi tidak menyentuh *demos* sebagai *core* dari demokrasi. Artinya demokrasi prosedural yang terjadi dan bukannya demokrasi substantif.

¹⁴ Lihat <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210330111654-32-623773/demokrat-moeldoko-singgung-organisasi-radikal-di-era-sby> (diakses 25 Juli 2023 pukul 16.35 WIB)

Berdasarkan kelima faktor dari Robert Kuttner itulah, kemudian mengakibatkan tidak terjadinya konsultasi politik dan *political recognition*. Dampaknya, timbullah kemarahan, perlawanan yang berakibat munculnya kelompok populisme kanan dengan segala variannya, sebagai alternatif jawaban atas situasi problematis yang ada dan muncul ke permukaan dengan isu-isu populismenya, sehingga mendapatkan dukungan dari kelompok masyarakat yang mengalami keputusasaan. Kelompok populis kanan ini berupaya untuk kemudian merangsek masuk ke kantong-kantong ormas Islam terbesar di Indonesia, Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah.

KESIMPULAN

Dapat ditarik kesimpulan bahwasanya apa yang disampaikan oleh Robert Kuttner dalam bukunya *Can Democracy Survive Global Capitalism* dengan 5 faktor pendekatan yang diungkapkan dalam bukunya, dapat membantu kita memahami mengenai muncul dan menguatnya kelompok populis kanan. Meskipun yang dibahas dalam bukunya tersebut adalah Amerika dan Eropa Barat atau diluar Indonesia, tetapi menurut hemat penulis, dapat pula digunakan untuk membaca dan memahami mengenai muncul dan menguatnya kelompok populis kanan atau Islam Politik di Indonesia. Bahwa ternyata terjadinya proses konvergensi antara perkembangan tatanan kapitalisme dengan penguatan politik demokrasi; adanya pergeseran politik yang signifikan; adanya fenomena *undemocratic globalization* yang mempengaruhi ruang-ruang politik dan adanya kerentanan sosial politik, merupakan jawaban mengapa kemudian di Indonesia jika mengikuti tesis Robert Kuttner tersebut, kelima faktor tersebut dikelola

dengan baik oleh kelompok populis kanan dan akhirnya mereka mendapatkan tempat di Indonesia, tidak hanya muncul melainkan menguat.

REFERENSI

Buku

- Bustami, Abd. Latif. Kiai Politik, Politik Kiai: Membedah Wacana Politik Kaum Tradisionalis, Pustaka Bayan: Malang
- Muhtadi, Burhanuddin. 2020. Kuasa Uang: Politik Uang Dalam Pemilu Pasca-Orde Baru,, KKPG: Jakarta
- Kantaprawira, Rusadi, 2004, Sistem Politik Indonesia: Suatu Model Pengantar, Penerbit Sinar Baru Al Gesindo : Bandung
- Keller, Suzanne, 1984, Penguasa dan Kelompok Elite: Peranan elite-penentu dalam Masyarakat Modern, Yayasan Ilmu ilmu Sosial: Jakarta
- Ever D Hans and Schiel Tilman. 1990. Kelompok-Kelompok Strategis: Studi Perbandingan Tentang Negara, Birokrasi dan Pembentukan kelas di Dunia Ketiga, Yayasan Obor Indonesia : Jakarta.
- Rachman, Budhy Munawar-. 2017. Reorientasi Pembaharuan Islam: Sekularisme, Liberalisme dan Pluralisme, Penerbit MADANI: Malang
- Maulana, Yusuf (Ed.), 2020. Rached Ghannouchi: Siasat Muslim Demokrat Di Arah Baru, Penerbit Yayasan Faham Indonesia Mandiri: Bekasi

- Zarkasyi, Hamid Fahmy. 2020. MINHAJ: Berislam, dari Ritual hingga Intelektual, Institute for The Study of Islamic Thought and Civilization (INSISTS): Jakarta
- Aziz, Abdul. 2011. Chiefdom Madinah: Salah Paham Negara Islam, Pustaka Alvabet: Jakarta
- Effendy, Bahtiar. 2009. Islam dan Negara: Transformasi Gagasan dan Praktik Politik Islam di Indonesia, Yayasan Wakaf Paramadina: Jakarta
- Rahman, Fazlur. 1982. Islam and Modernity: Transformation of An Intellectual Tradition, The University of Chicago Press: London
- Roy, Oliver. 1994. The Failure of Political Islam, I.B Tauris: London
- Kuttner, Robert. 2019. Can Democracy Survive Global Capitalism. New York: W.W Norton & Company
- Ridwan, Nur Khalik. 2019. *Masa Depan NU: Dinamika Dan Tantangan*. Yogyakarta: IRCiSoD

JURNAL

- Journal of Global Strategic Studies (JGSS)*, Vol. 01 No. 01 June 2021
(*Nahdlatul Ulama And Its Commitment Towards Moderate Political Norms: A Comparison Between The Abdurrahman Wahid And Jokowi Era*)
- Jurnal Indonesia, Volume 11, April 2021 (*Rising Islamic Conservatism in Indonesia: Islamic Groups and Identity Politics*)
- Marcus Meitzner and Burhanuddin Muhtadi. *The Myth of Pluralism: Nahdlatul Ulama and The Politics of Religious Tolerance in Indonesia on Journal Contemporary Southeast Asia*. Vol. 42, No. 1 (2020)

Ahmad Zainul Hamdi. *Constructing Indonesian Religious Pluralism: The Role of Nahdlatul Ulama in Countering Violent Religious Extremism* on Journal of Indonesian Islam, Vol. 15, Number 02, December 2021.

Robert W. Hefner. "Rising Islamic Conservatism in Indonesia: Islamic Groups and Identity Politics" pada Jurnal Indonesia, Volume 11, April 2021

M. Kholid Syeirazi dalam *Wasathiyah Islam: Anatomi Narasi dan Kontestasi Gerakan Islam*. Jakarta: Penerbit Alif.Id, 2020)

Francis Fukuyama. 1989. *The End of History and The Last Man*.

Sumber Internet

<https://www.nu.or.id/post/read/75259/gus-dur-menyebutnya-kiai-kampung->

<https://nasional.kompas.com/read/2020/12/23/06344311/yaqut-cholil-qoumas-agama-jangan-lagi-digunakan-jadi-alat-politik?page=all>

<https://tirto.id/ulil-jil-dan-kritik-terhadap-islam-yang-mapan-cMcE>

https://sepakat.bappenas.go.id/wiki/Koefisien_Gini

<https://money.kompas.com/read/2015/03/18/164300326/Dibanding.Ord>
[e.Baru.Kesenjangan.Sosial.di.Era.Reformasi.Justru.Melebar](https://money.kompas.com/read/2015/03/18/164300326/Dibanding.Ord)

<https://www.indonesia-investments.com/id/keuangan/angka-ekonomi-makro/kemiskinan/item301?>

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210330111654-32-623773/demokrat-moeldoko-singgung-organisasi-radikal-di-era-sby>